

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa kantor pertanahan yang merupakan bagian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah yang bersertifikat ganda di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, berperan penting untuk memastikan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah jelas, mencegah adanya konflik yang berkepanjangan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Proses penyelesaian sengketa tanah yang bersertifikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana juga sudah membentuk Tim Penanganan Tumpang Tindih berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor MP.01.02/928-51/VII/2025 Tanggal 1 Juli 2025 tentang Penanganan Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah.

B. Saran

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka penulis mengusulkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten

Jembrana, Provinsi Bali melaksanakan pendataan kembali terhadap data fisik dan data yuridis hak kepemilikan tanah. Hal tersebut guna meminimalisir kesalahan yang bersumber dari data lokal supaya tidak menimbulkan tanah yang bersertifikat ganda. Penulis juga menekankan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali agar memperkuat sistem digitalisasi data pertanahan agar lebih akurat dan mudah diakses. Sementara, kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana, disarankan agar selalu memverifikasi keaslian sertifikat tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Tujuannya adalah untuk menjamin kecocokan antara sertifikat dengan buku tanah, serta mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanah yang bersertifikat tumpang tindih atau yang dikenal sebagai sertifikat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Djoko Walijatun, 1998, *Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan*, Dalam seminar Reformasi Pertanahan, Media Fajar, Ujung Pandang.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendri Jayadi, 2023, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Negosiasi*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Prespektif Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono dan Nurhasan Ismail, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Gramedia, Jakarta.
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal dan Skripsi

Dinata, I Gede Agus Marta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2 (2021).

Fifiana Wisnaeni Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, 2020, *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*, Universitas Diponegoro.

Meita Djohan Oe, 2015, “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol.10. No.1 (2015), Universitas Bandar Lampung.

Ningrum Ambasari, Noor Azizah, 2019, “Urgensi Pendaftaran Pada Tanah Yang Belum Bersertifika”t, *Al’Adl*, Volume 10 Nomor 1, Januari 2019, Universitas Islam Kalimantan.

Nifantri Mulya Ningsih, dkk. 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol2/No-5/2022, Universitas Pattimura.

Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni, 2020, *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*, Universitas Diponegoro.

S Sitepu, 2023, *Pengaturan Klausula Mediasi Dan Arbitrase (MedArb) Dalam Penyelesaian Sengketa Ditinjau Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999*, Universitas Jambi.

Sitti Anisa, Ahmad Rustan, Rudi Iskandar I, Wahyudi Umar, 2024, “Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda dan Mekanisme Penyelesaiannya”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.9 (2024), Rewang Rencang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 218. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 720. Sekretariat Negara. Jakarta.

